

KEUANGAN DAERAH – KABUPATEN PAMEKASAN

2025

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO. 2, LD 2025 / NO. 2, TLD 30, 102 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi PKD, APBD, penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan Daerah dan utang Daerah, BLUD, penyelesaian kerugian Daerah, informasi keuangan Daerah, dan pembinaan dan pengawasan .
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2025
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku maka : Perda Kab. Pamekasan No. 8 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 19 HLM
 - Lampiran : - HLM